



BAB I GAMBARAN UMUM BPKAD

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun –tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA-PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Tahun 2020.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan. Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan. Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112). Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan diatur dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Banggai. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur



pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) baik program yang kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan sebagai berikut yaitu Forum SKPD, MusyawarahPerencanaan Pembangunan Prrovinsi, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/OPD Terkait), Rapat Koordinasi Progam Tahun 2020.



1.2. Landasan Hukum

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020 ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020 adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 – 2021 yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga semua program dan kegiatan yang disusun lebih mengarah kepada perkembangan kebutuhan yang ada sehingga visi yang ditetapkan lebih nyata dapat diwujudkan. Dengan demikian Renja BPKAD Kab. Banggai merupakan Garis Pedoman *'guideline'* dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD/ RENJA Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019 total Anggaran perubahan sebesar **Rp.25.040.273.546,09,-** telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung **Rp.18.152.831.847,34,-** dengan realisasi **Rp.12.721.034.015; (70,00%)** dan pagu Belanja Langsung sebesar **Rp.6.887.441.698,75,-** dengan realisasi sebesar **Rp.6.603.865.690,- (95,88%)** dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

➤ **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri atas 11 kegiatan dengan total pagu anggaran Rp.2.597.196.878,- dan realisasi keuangan Rp.2.433.705.045,- mencapai persentase sebesar 93,71%. Sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.163.491.835,- atau 6,29%. Adapun pagu, realisasi, permasalahan dan solusi masing – masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.192.000,- realisasi keuangan Rp. 11.568.000,- mencapai persentase sebesar 95%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.624.000,- atau 5% yaitu Belanja Paket/Pengiriman disebabkan karena anggaran ini peruntukannya bila ada pengiriman buku atau paket lainnya.



1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.231.500.000,- realisasi keuangan Rp. 180.962.169,- mencapai persentase sebesar 78,17%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.50.537.831,- atau 21,83% disebabkan karena Belanja Telepon, Belanja Air, Belanja Listrik direalisasikan sesuai rekening tagihan dari pihak/perusahaan yang bersangkutan.

1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 66.509.900,- realisasi keuangan Rp. 66.213.623,- mencapai persentase sebesar 99,55%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.296.277,- atau 0,45% disebabkan karena ada sisa dari Belanja Peralatan Kebersihan Kantor yang tidak sempat dibelanjakan.

1.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 82.368.500,- realisasi keuangan Rp. 82.368.450,- mencapai persentase sebesar 100%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 50,- sehingga ini dianggap terealisasi seluruhnya.

1.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 55.200.000,- realisasi keuangan Rp. 54.450.000,- mencapai persentase sebesar 98,64%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.750.000,- atau 1,36%, ini disebabkan karena ada Belanja Cetak yang tidak sempat dibelanjakan.

1.6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 30.429.000,- realisasi keuangan Rp. 30.393.068,- mencapai persentase sebesar 99,88%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.35.932,- atau 0,12%, ini disebabkan karena ada Belanja Cetak yang tidak sempat dibelanjakan.

1.7. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.500.000,- realisasi keuangan Rp. 7.472.932,- mencapai persentase sebesar 99,64%, sisa pagu



yang tidak terealisasi sebesar Rp.27.068,- ini disebabkan karena realisasi disesuaikan dengan tagihan dari media massa setiap bulan.

1.8. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman,

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 39.520.000,- realisasinya keuangan Rp. 27.038.371,- mencapai persentase sebesar 68,42%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp.12.481.629,- atau 31,58%, ini disebabkan karena belanja makanan dan minuman rapat direalisasikan sesuai kebutuhan.

1.9. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.030.885.000,- realisasinya keuangan Rp.1.026.989.010,- mencapai persentase sebesar 99,62%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 3.895.990,- atau 0,38%, ini disebabkan karena perjalanan dinas dilaksanakan apabila ada koordinasi dan konsultasi ke provinsi ataupun ke kementerian yang mendesak atau diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.10. Kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.142.792.478,- realisasinya keuangan Rp. 142.422.430,- mencapai persentase sebesar 99,74%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 370.048,- atau 0,26%, ini disebabkan karena perjalanan dinas dilaksanakan apabila ada koordinasi dan konsultasi dalam daerah di Kecamatan, Kelurahan maupun Desa yang mendesak atau diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD.

1.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.898.300.000,- realisasinya keuangan Rp. 803.826.992,- mencapai persentase sebesar 89,48%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp.94.470.008,- atau 10,52%, ini disebabkan karena ada Belanja Non PNS / Pegawai Tidak Tetap direalisasikan sesuai jumlah tenaga honorer yang aktif.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri atas 6 kegiatan dengan total pagu Rp. 347.643.568,- realisasi keuangan Rp. 308.224.566,- mencapai persentase sebesar 88,66% sisa pagu Rp.39.419.002,- ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang, yaitu :

2.1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 31.930.000,- realisasinya keuangan Rp. 29.938.819,- mencapai persentase sebesar 93,76%, sisa pagu



yang tidak terealisasi Rp.1.991.181,- atau 6,24%, terdapat pada pengadaan belanja AC Split, disebabkan karena realisasi belanja disesuaikan dengan harga yang terdapat pada e-catalog.

2.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.199.386.750,- realisasinya keuangan Rp. 181.820.880,- mencapai persentase sebesar 91,2%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp.17.565.870,- atau 8,8%, terdapat pada pengadaan belanja Laptop, Printer dan UPS, disebabkan karena realisasi belanja disesuaikan dengan harga yang terdapat pada e-catalog.

2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 82.000.000,- realisasinya keuangan Rp. 74.168.148,- mencapai persentase sebesar 90,45%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp.7.831.852,- atau 9,55%, terdapat pada belanja BBM dan belanja jasa service kendaraan roda empat dan dua. Ini disebabkan karena pemeliharaan yang direalisasikan menyesuaikan tingkat kerusakan masing – masing kendaraan.

2.4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15.326.818,- realisasinya keuangan Rp. 15.305.455,- mencapai persentase sebesar 99,86%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 21.363,- atau 0,14%, terdapat pada belanja jasa service AC, ini disebabkan karena pemeliharaan yang direalisasikan menyesuaikan tingkat kerusakannya.

2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.000.000,- realisasi keuangan Rp. 6.991.264,- mencapai persentase sebesar 49,94%, %, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 7.008.736,- mencapai persentase sebesar 50,06%, disebabkan tidak semua peralatan kantor perlu pemeliharaan atau tidak adanya kerusakan yang sekiranya sangat membutuhkan perbaikan.

2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- tidak ada realisasi disebabkan karena pemeliharaan yang direalisasikan disesuaikan tingkat kerusakannya.



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terdiri dari 2 kegiatan dengan total pagu Rp. 94.480.000,- realisasi keuangan Rp. 76.426.734,- mencapai persentase sebesar 80,89%. Yang tidak terealisasi sebesar Rp. 18.053.266,- atau 19,11%, adapun realisasi dan permasalahan masing – masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 63.000.000,- realisasi keuangan Rp. 45.000.000,- mencapai persentase sebesar 71,43%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.18.000.000 atau 28,57% ini disebabkan karena belanja kepesertaan atau kontribusi untuk pendidikan dan pelatihan yang direalisasikan menyesuaikan jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

1.2. Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 31.480.000,- realisasi keuangan Rp. 31.426.734,- mencapai persentase sebesar 99,83%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.53.266,- atau 0,17% terdapat pada belanja makanan dan minuman lembur yang direalisasikan sesuai jam lembur yang ada.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri atas 6 kegiatan dengan total pagu Rp. 73.916.775,- realisasi keuangan Rp. 70.521.236,- mencapai persentase sebesar 95,41%. Yang tidak terealisasi sebesar Rp. Rp. 3.395.539,- atau 4,59%. Adapun realisasi dan permasalahan masing – masing kegiatan yaitu :

4.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.400.000,- realisasi keuangan Rp. 4.399.150,- mencapai persentase sebesar 99,98%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp. 850,- atau 0,02% terdapat pada belanja alat tulis kantor yang tidak sempat dibelanjakan.

4.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.000.000,- realisasi keuangan Rp. 8.989.400,- mencapai persentase sebesar 99,88%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.10.600,- atau 0,12% terdapat pada belanja alat tulis kantor yang tidak sempat dibelanjakan.



4.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.937.200,- realisasi keuangan Rp. 8.917.100,- mencapai persentase sebesar 99,78% sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.20.100,- atau 0,22% terdapat pada belanja alat tulis kantor yang tidak sempat dibelanjakan.

4.4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 34.555.000,- realisasi keuangan Rp. 31.998.446,- mencapai persentase sebesar 92,60%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.2.556.554,- atau 7,4% terdapat pada belanja lembur non PNS dan penjilidan, disebabkan belanja lembur yang disediakan untuk tenaga honorer, realisasinya disesuaikan jam lembur yang dilaksanakan, sedangkan belanja penjilidan tidak mencapai 100% disebabkan jilid RKA dan DPA penetapan dilakukan di tahun 2020

4.5. Kegiatan Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.750.000,- realisasi keuangan Rp. 3.742.450,- mencapai persentase sebesar 99,80%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp. 7.550,- atau 0,2% terdapat pada belanja makanan dan minuman lembur yang direalisasikan sesuai jam lembur yang ada.

4.6. Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 31.480.000,- realisasi keuangan Rp. 31.426.734,- mencapai persentase sebesar 99,83%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.53.266,- atau 0,17% terdapat pada belanja alat tulis kantor yang tidak sempat dibelanjakan.

5. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan total pagu Rp. 2.600.000,- dan realisasi keuangan Rp. 2.566.000,- mencapai persentase sebesar 98,69%. Sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 34.000,- atau 1,31%. Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

5.1. Kegiatan Penyediaan Data dan Updating Data dan Informasi Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.600.000,- realisasi keuangan Rp. 2.566.000,- mencapai persentase sebesar 99,83%, sisa pagu



tidak terealisasi sebesar Rp.34.000,- atau 1,31%. terdapat pada belanja alat tulis kantor yang tidak sempat dibelanjakan.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian indikator kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut : Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi sebesar 100% yaitu berupa 2 (dua) Dokumen yang terdiri dari Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Persentase Penatausahaan Keuangan yang Tepat Waktu dan Tepat Proses sebesar 100%, Persentase Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu sebesar 100%, Persentase SDM yang Memahami Penyusunan Laporan Keuangan PD dan PPKD sebesar 90,18%, Persentase Penanganan Kasus TGR sebesar 100% dari 10 target kasus yang diselesaikan, pada tahun 2019 tertangani sebanyak 15 kasus, Persentase Kesesuaian Buku Induk Inventaris Kabupaten sebesar 100%. Alokasi anggaran pada program adalah sebesar Rp. 2.977.148.262,75 dengan realisasi sebesar Rp. 2.922.383.726,- setara dengan 98,16% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

6.1. Kegiatan Penyusunan Analisa Standar Belanja

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.37.303.475,- realisasi keuangan Rp.37.283.336,- atau 99,95%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.20.139,- mencapai persentase sebesar 0,05%. Output kegiatan ini adalah Jumlah Data Analisa Standar Belanja (ASB). Outputnya berupa 1 (satu) Dokumen ASB, Outcome kegiatan ini adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.2. Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.70.241.750,- realisasi keuangan Rp.70.241.750,- mencapai persentase sebesar 100%, dikegiatan ini semua belanja terealisasi. Output kegiatan ini adalah Jumlah Data Penyusunan standar satuan harga, outputnya berupa 2 (dua) Buku standar satuan harga pada penetapan dan perubahan APBD, Outcome kegiatan ini adalah Persentase Data Aset yang Akurat.



6.3. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.20.791.900,- realisasi keuangan Rp.20.706.472,- mencapai persentase sebesar 99,59%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.85.428,- atau 0,41% terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Penyusunan SISDUR Pengelolaan Keuangan Daerah, outputnya berupa Dokumen Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.4. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.406.710.906,75,- realisasi keuangan Rp.406.330.860,- mencapai persentase sebesar 99,91%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.380.046,75,- atau 0,09%, terdapat pada belanja perjalanan dinas luar daerah disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, outputnya berupa 2 dokumen rancangan Perda tentang APBD, Outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.5. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.170.913.168,- realisasi keuangan Rp. 167.549.370,- mencapai persentase sebesar 98,03%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.3.363.798,- atau 1,97%, terdapat pada belanja perjalanan dinas luar daerah disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, outputnya berupa 2 dokumen rancangan tentang perda perubahan APBD, Outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.6. Kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.7.250.000,- realisasi keuangan Rp.7.093.860,- mencapai persentase sebesar 97,85%, sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp.156.146,- atau 2,15%. Pagu yang tidak



teralisasi terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat, karena menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan. Outputnya adalah Jumlah Data dan Peserta Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.7. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.343.193.500,- realisasi keuangan mencapai Rp.342.355.188,- mencapai persentase sebesar 99,76%, sedangkan yang tidak terealisasi sebesar Rp. 838.312,- atau 0,24% terdapat pada belanja tenaga ahli yang realisasinya menyesuaikan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, outputnya berupa labelisasi dan lelang barang daerah, Outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

6.8. Penatausahaan Barang Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.127.085.750,- realisasi keuangan mencapai Rp.127.071.280,- persentase mencapai 99,99%. Yang tidak terealisasi sebesar Rp. 14.470,- atau 0,01% terdapat pada belanja perjalanan dinas luar daerah disebabkan karena sisa pagu tidak sesuai standar perjalanan dinas untuk direalisasikan. Outputnya adalah Jumlah Data Penatausahaan Barang Daerah, Outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

6.9. Penyusunan Standar Pelayanan Publik

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.4.499.875,- realisasi keuangan mencapai Rp.3.226.950,- persentase mencapai 71,71%. Sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.272.925,- atau 28,29% rendahnya realisasi terdapat pada belanja makanan dan minuman lembur tidak direalisasikan disebabkan karena adanya efisiensi anggaran. Outputnya adalah Jumlah Data Standar Pelayanan Publik, Outcomenya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

6.10. Kegiatan Penatausahaan Keuangan PD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.5.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 4.979.400,- persentase mencapai 99,59%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 29.600,- atau 0,41% pada belanja alat tulis kantor, disebabkan karena sisa pagu tidak sempat dibelanjakan. Outputnya adalah



Jumlah Data Penatausahaan Keuangan PD, Outcomenya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

6.11. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPKD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.15.502.000,- dan realisasi keuangan Rp.15.462.140,- persentase mencapai 99,74%, sisa pagu yang tidak terealisasi Rp. 29.860,- atau 0,26% pada belanja makanan dan minuman lembur, disebabkan karena realisasi ini disesuaikan dengan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Penatausahaan Keuangan SKPKD, Outcomenya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

6.12. Kegiatan Fasilitasi dan Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.8.000.000,- dan realisasi keuangan Rp.7.884.924,- persentase mencapai 98,56%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 115.076,- atau 1,44% dikarenakan belanja alat tulis kantor dan belanja makanan dan minuman lembur direalisasikan sesuai kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Fasilitasi dan Penyediaan Data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan, Outcomenya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

6.13. Kegiatan Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.59.599.700,- dan realisasi keuangan Rp.59.242.220,- persentase mencapai 99,40%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 357.480,- atau 0,6% terdapat pada belanja makanan dan minuman rapat yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Fasilitasi dan Penatausahaan TPTGR, outputnya berupa jumlah kasus yang diselesaikan dalam 1 (satu) tahun, Outcomenya adalah Opini BPK Terhadap LKPD.

6.14. Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.99.071.000,- dan realisasi keuangan Rp.90.311.200,- persentase mencapai 91,16%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.8.759.800,- atau 8,84% terdapat pada belanja pegawai honorer/tidak tetap yang disesuaikan dengan jumlah tenaga admin SKPKD serta belanja lembur non PNS yang disesuaikan jumlah jam yang lembur. Outputnya adalah Jumlah data tentang pengembangan dan



pengendalian system informasi manajemen keuangan daerah, Outcomenya adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja.

6.15. Kegiatan Penyelenggaraan Program Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.178.185.738,- dan realisasi keuangan Rp.178.113.968,- persentase mencapai 99,96%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 71.770,- atau 0,04% terdapat pada beberapa belanja yaitu belanja penggandaan, penjilidan serta makanan dan minuman rapat yang rata – rata hampir terealisasi 100%, sisa pagu yang tidak terealisasi disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Penerima Bantuan, Outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.16. Kegiatan Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA PD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.54.900.000,- realisasi keuangan Rp.54.579.262,- persentase mencapai 99,42%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 320.738,- atau 0,58% terdapat belanja makanan dan minuman rapat yang realisasinya menyesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Bahan Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA, outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.17. Kegiatan Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.24.899.725,- realisasi keuangan Rp. 24.710.499,- persentase mencapai 99,24%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 189.226,- atau 0,75% terdapat pada belanja penggandaan dan makanan dan minuman rapat yang realisasinya menyesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah data pengelolaan penyaluran dana bantuan keuangan, outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.18. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.31.376.575,- realisasi keuangan Rp.31.294.146,- persentase mencapai 99,74%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 82.429,- atau 0,26% terdapat pada belanja penggandaan dan belanja makanan dan minuman lembur direalisasikan sesuai kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah data Penyusunan



Rancangan Peraturan Bupati tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD, berupa dokumen pergeseran anggaran, outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan.

6.19. Kegiatan Asistensi/Verifikasi dan Pengentrian Data Anggaran PD dalam Rangka Penerbitan SPD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.16.000.000,- realisasi keuangan Rp.15.999.300,- persentase mencapai 99,99%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 700,- atau 0,01% terdapat belanja alat tulis kantor disebabkan karena sisa pagunya tidak mencukupi untuk direalisasikan. Outputnya adalah Jumlah data Asistensi/Verifikasi dan Pengentrian Data Anggaran PD dalam Rangka Penerbitan SPD, outputnya berupa laporan verifikasi dan pengentrian data anggaran PD untuk penerbitan SPD, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.20. Kegiatan Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM PD dalam Rangka Penerbitan SP2D

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.80.000.000,-realisasi keuangan Rp.79.835.000,- persentase mencapai 99,79%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 165.000,- atau 0,21% terdapat pada belanja alat tulis kantor dan belanja makanan dan minuman lembur disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah data Penelitian/Verifikasi Kelengkapan SPM PD dalam Rangka Penerbitan SP2D, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.21. Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.102.000.000,- realisasi keuangan Rp. 100.577.604,- persentase mencapai 98,61%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.422.396,- atau 1,39% terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan. Outputnya adalah Jumlah data Monitoring dan Pembinaan Tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, outputnya berupa laporan monitoring dan evaluasi tugas



bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.22. Kegiatan Penyusunan Laporan Arus Kas

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.17.499.900,- realisasi keuangan Rp.17.469.900,- persentase mencapai 99,83%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 30.000,- atau 0,17% terdapat pada belanja alat tulis kantor disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah data Penyusunan Laporan Arus Kas, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.23. Kegiatan Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.60.828.975,- realisasi keuangan Rp.60.262.630,- persentase mencapai 99,07%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 566.345,- atau 0,93% terdapat pada belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam daerah disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan. Outputnya adalah Jumlah data Penatausahaan Administrasi Kas Umum Daerah, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.24. Kegiatan Bimtek Penatausahaan Keuangan PD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.17.550.000,- realisasi keuangan Rp.17.550.000,- persentase mencapai 100%. Outputnya adalah Jumlah peserta dan data Bimtek Penatausahaan Keuangan PD, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.25. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.35.399.700,- realisasi keuangan Rp.28.518.885,- persentase mencapai 80,56%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.6.880.815,- atau 19,44% terdapat pada belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan perjalanan dinas luar daerah, disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan. Outputnya adalah Jumlah data Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah, outcomenya adalah Opini BPK Terhadap LKPD.



6.26. Kegiatan Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah Serta Penyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.209.868.125,- realisasi keuangan Rp. 204.981.323,- persentase mencapai 97,67%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.886.802,- atau 2,33% terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah disebabkan karena realisasinya menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan. Outputnya adalah jumlah data Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah Serta Penyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait, outputnya berupa laporan rekonsiliasi, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.27. Kegiatan Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA PD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.15.000.000,- realisasi keuangan Rp. 14.995.000,- persentase mencapai 99,97%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 5.000,- atau 0,03% terdapat pada belanja alat tulis kantor yang disesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA PD, outputnya berupa laporan pembinaan penyusunan SPJ PD, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.28. Kegiatan Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.83.500.000,- realisasi keuangan Rp. 83.382.367,- persentase mencapai 99,86%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 117.633,- atau 0,14% terdapat pada belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas luar daerah yang disesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji PNS, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.29. Kegiatan Sosialisasi Penggajian PNS

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.20.200.000,- realisasi keuangan Rp.18.950.000,- persentase mencapai 93,81%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.250.000,- atau 6,19% terdapat pada belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam daerah yang disesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah jumlah peserta dan data Sosialisasi Penggajian PNS, outputnya berupa laporan sosialisasi,



outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.30. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.46.450.000,- realisasi keuangan Rp.42.946.195,- persentase mencapai 92,49%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.3.503.805,- atau 7,514% terdapat pada belanja alat tulis kantor, dekorasi, transportasi dan akomodasi, serta penggandaan yang disesuaikan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah jumlah peserta dan data Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan, outputnya berupa BIMTEK penyusunan Laporan Keuangan PD serta data SDM yang mampu menyusun Laporan Keuangan, outcomenya adalah Opini BPK terhadap LKPD.

6.31. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.237.796.549,- realisasi keuangan Rp. 227.684.297,- persentase mencapai 95,75%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.10.112.252,- atau 4,25% terdapat pada belanja alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan perjalanan dinas luar daerah yang disesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD, outputnya berupa dokumen rancangan pertanggungjawaban APBD, outcomenya adalah Opini BPK terhadap LKPD.

6.32. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.12.799.700,- realisasi keuangan Rp. 8.439.090,- persentase mencapai 65,93%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.4.360.610,- atau 34,07% terdapat pada belanja alat tulis kantor, cetak dan penggandaan yang disesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan, outcomenya adalah Opini BPK terhadap LKPD.

6.33. Kegiatan Rekonsiliasi Realisasi APBD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.127.377.551,- realisasi keuangan Rp. 123.939.200,- persentase mencapai 97,30%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.3.438.351,- atau 2,7% terdapat pada belanja penggandaan, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas dalam daerah, serta perjalanan dinas luar daerah yang disesuaikan kebutuhan



pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Rekonsiliasi Realisasi APBD, outcomenya adalah Opini BPK terhadap LKPD.

6.34. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian SPJ OPD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.64.253.000,- realisasi keuangan Rp. 63.413.185,- persentase mencapai 98,69%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 839.815,- atau 1,31% terdapat pada belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas dalam daerah, yang disesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Pembinaan dan Pengendalian SPJ OPD, outcomenya adalah Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target.

6.35. Kegiatan Pembinaan Kebijakan dan Sistem Akuntansi PD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.150.599.700,- realisasi keuangan Rp. 149.516.034,- persentase mencapai 99,28%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.083.666,- atau 0,72% terdapat pada belanja penggandaan yang disesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data Kebijakan dan Sistem Akuntansi PD, outcomenya adalah Opini BPK terhadap LKPD.

6.36. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Anggaran OPD

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.15.500.000,- realisasi keuangan Rp. 15.486.891,- persentase mencapai 99,92%, sisa pagu yang tidak terealisasi sebesar Rp. 13.109,- atau 0,08% terdapat pada belanja alat tulis kantor direalisasikan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Data Pembinaan dan Pengendalian Anggaran OPD, Outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan

7. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Capaian indikator kinerja Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut : Persentase Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi sebesar 100%, Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dengan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.2.945.275,- realisasi keuangan Rp.2.926.000,- mencapai persentase sebesar 99,35%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 19.275,- atau 0,65%. Adapun permasalahan dan solusi kegiatannya adalah sebagai berikut :

7.1. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.2.945.275,- realisasi keuangan Rp.2.926.000,- persentase mencapai 99,35%, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.19.275,- atau 0,65%, terdapat pada belanja cetak yang direalisasikan sesuai kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa, outcomenya adalah Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan

8. Program Pengelolaan Barang Daerah

Capaian indicator kinerja Program Pengelolaan Barang Daerah adalah : Persentase Data Aset yang Akurat, sebesar 100%, Program ini terdiri dari 8 Kegiatan jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.791.510.940,- realisasi keuangan Rp.787.112.383,- mencapai persentase sebesar 99,44%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.398.557,- atau 0,56%. Adapun permasalahan dan solusi masing - masing kegiatan adalah sebagai berikut :

8.1. Kegiatan Pensertifikatan Tanah dan Aset Pemerintah Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.328.015.900,- realisasi keuangan Rp.324.655.633,- persentase mencapai 98,98%, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.3.360.267,- atau 1,02%, terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah disebabkan karena realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah jumlah data pensertifikatan tanah aset pemerintah kabupaten, berupa administrasi pensertifikatan tanah aset pemerintah kabupaten, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.45.422.900,- realisasi keuangan Rp. 45.422.900,- persentase mencapai 100%. Outputnya adalah jumlah data Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah, berupa jumlah dokumen buku induk inventaris dan buku persediaan yang tersusun tepat waktu, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.3. Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.156.965.050,- realisasi keuangan Rp.156.349.700,- persentase mencapai 99,61%, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.915.350,- atau 0,39%, terdapat pada



belanja transportasi dan akomodasi disebabkan karena realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, outputnya adalah Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.4. Kegiatan Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.192.591.190,- realisasi keuangan Rp.192.584.490,- persentase mencapai 99,99%, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.6.700,- atau 0,01%, terdapat pada belanja perjalanan dinas dalam daerah disebabkan karena anggaran yang tersisa tidak mencukupi untuk direalisasikan sesuai standar biaya perjalanan dinas dalam daerah. Outputnya adalah Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.5. Kegiatan Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.26.613.600,- realisasi keuangan Rp. 26.613.600,- persentase mencapai 100%. Outputnya adalah Jumlah SDM Pengurus Barang Pengguna yang handal, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.6. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.20.226.600,- realisasi keuangan Rp. 20.226.600,- persentase mencapai 100%. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMD yang tersusun tepat waktu, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.7. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.10.375.350,- realisasi keuangan Rp.10.375.350,- persentase mencapai 100%. Outputnya adalah Jumlah BMD yang ditertibkan, outcomenya adalah Persentase Data Aset yang Akurat.

8.8. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.11.300.350,- realisasi keuangan Rp.10.884.110,- persentase mencapai 96,32%, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.416.240,- atau 3,68%, terdapat pada



belanja makanan dan minuman rapat, disebabkan karena realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Outputnya adalah Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang tersusun tepat waktu, outcomenya Persentase Data Aset yang Akurat.

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Banggai yang sebelumnya merupakan Dinas PPKA telah memenuhi tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Organisasi, hal ini dapat tercermin dari pencapaian satu sasaran teknis dan satu sasaran rutin.

**Pencapaian Sasaran dan Realisasi
BPKAD Kab. Banggai
Tahun 2019**

NO	SASARAN	PAGU	REALISASI	NILAI CAPAIAN (%)
1	<i>Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	3.247.910.096,00	3.247.910.096,00	100,00%
2	<i>Meningkatnya Tata Kelola BPKAD yang Bersih dan Akuntabel (BAGIAN SEKRETARIAT)</i>	3.639.531.603,00	3.355.955.594,00	92,21%
	JUMLAH	6.887.441.699,00	6.603.865.690,00	95,88%

Meskipun realisasi anggaran sebesar 95,88% dari pagu yang dianggarkan, BPKAD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan Pemerintah Daerah, namun demikian ada beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut dipengaruhi oleh peran serta pihak eksternal yang tidak dapat dilaksanakan sesuai skedul yang diharapkan.

**Perbandingan Realisasi Kinerja**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU 2018	REALISASI 2018	NILAI CAPAIAN (%) 2018	PAGU 2019	REALISASI 2019	NILAI CAPAIAN (%) 2019
1.	<i>Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan	1.156.182.388	791.131.637	68,43	950.776.762	946.074.664	99,51
		Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target	955.691.425	882.504.800	92,34	686.700.000	677.416.309	98,65
		Opini BPK Terhadap LKPD	675.022.900	630.298.046	93,37	670.022.900	640.285.921	95,56
		Persentase Data Aset Yang Akurat	2.328.656.940	2.074.749.200	89,10	1.332.031.940	1.326.780.601	99,61
2.	<i>Meningkatnya Tata Kelola BPKAD yang Baik, Bersih dan Akuntabel (BAGIAN SEKRETARIAT)</i>	Nilai Akuntabilitas Kinerja	5.213.780.273	4.792.624.436	91,92	3.247.910.096	3.013.308.195	92,78
	JUMLAH		10.329.333.926	9.171.308.119	88,79	6.887.441.699	6.603.865.690	95,88

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pagu antara tahun 2018 dan tahun 2019, dimana tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp.10.329.333.926,- sedangkan tahun 2019 turun menjadi Rp.6.887.441.699,- sedangkan realisasi antara tahun 2018 dan tahun 2019 naik dari 88,79% menjadi 95,88%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *output* dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika



realisasi *output* sama atau melebihi target, sedangkan realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan in-efisien disebabkan realisasi *output* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektifitas adalah perbandingan antara *rasio* pencapaian *outcome* dengan *rasio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Pada tahun Anggaran 2017 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan 11 (sebelas) Program dengan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan (terlampir) dengan pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa Program Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan dengan baik/berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari berjalannya sebagian besar kegiatan baik yang menyangkut pengelolaan pendapatan maupun pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, Capaian untuk masing - masing kegiatan dapat diuraikan pada Tabel formulir penetapan kinerja (terlampir), dari semua kegiatan - kegiatan yang ada sesuai dengan indikator kinerja pada dasarnya sebagian besar telah dicapai sebagaimana apa yang diharapkan hal ini dapat dilihat sampai dengan posisi 31 Desember 2018. Dengan demikian dengan kondisi ini kami menganggap bahwa sasaran ini secara relatif dan secara umum dapat dicapai.

Dalam Tahun Anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai memperoleh target pendapatan dan Alokasi Dana Anggaran belanja yang bersumber dari APBD antara lain : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Lain-lain Daerah dan SILPA tahun 2019. Adapun Penjelasan sebagai berikut :

**Target dan realisasi pendapatan dan belanja BPKAD tahun 2019**

No.	Uraian / Pendapatan / Belanja / Program / Kegiatan	Pendapatan/Belanja (Rp)		%
		Target/Pagu Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
4	Pendapatan Daerah (Termasuk PAD)	1.886.812.832.324,00	1.748.526.609.603,51	92,67
4.1	Pendapatan Asli Daerah	11.141.104.997,24	12.812.428.186,51	115,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.830.645.594,00	2.830.645.594,00	100,00
4.1.4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.310.459.383,24	9.981.782.592,51	120,11
4.2	Dana Perimbangan	1.489.614.730.803,00	1.357.410.270.331,00	91,12
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	298.158.180.803,00	188.959.243.582,00	63,38
4.2.2	Dana Alokasi Umum	909.543.487.000,00	901.030.313.000,00	99,06
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	281.913.063.000,00	267.420.713.749,00	94,86
4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	386.056.996.544,00	378.303.911.086,00	97,99
4.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	64.288.200.000,00	54.077.364.647,00	84,12
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	43.276.156.544,00	45.733.906.439,00	105,68
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	278.147.640.000,00	278.147.640.000,00	100,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya	345.000.000,00	345.000.000,00	100,00
5	Belanja			
5.1	Belanja Tidak Langsung	408.070.124.405,34	395.349.631.296,00	96,88
5.1.3	Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.020.000,00	99,80
5.1.4	Belanja Hibah	20.786.400.000,00	18.564.000.000	89,71
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.092.943.747,00	2.161.750.00,00	30,48
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	8.506.700.000,00	8.506.700.000,00	100,00
5.1.7	Belanja Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	352.527.248.811,00	352.493.128.947,00	99,99
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	600.000.000,00	500.000.000,00	83,33
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	18.409.729.695,69	114.431.488,75	0,62
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.409.729.695,69	77.431.488,75	0,45
6.1.5	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	1.000.000.000,00	37.000.000,00	3,7
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00		
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	-	

Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai untuk mewujudkan



pengelolaan keuangan yang akuntabel diharapkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sasaran dan output.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kondisi Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) ditentukan oleh :

1. Kondisi Lingkungan Internal

Faktor keberhasilan suatu Institusi BPKAD dapat dilihat dari kondisi lingkungan Internalnya, adapun kondisi lingkungan internal dijabarkan sebagai berikut :

a. *Kekuatan*

- Potensi Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.
- Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk menjadikan Kabupaten Banggai memiliki sistim pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar.
- Perlatan kerja yang cukup memadai.
- Suasana kerja yang kondusif.
- Komitmen pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia ditandai dengan diberikannya pagu anggaran untuk diklat keuangan.
- Motivasi yang cukup tinggi dari semua staf.
- Dukungan masyarakat (SKPD terkait)

b. *Kelemahan*

- Kapasitas sumber daya aparatur belum sepenuhnya memenuhi tuntutan sistim pengelolaan keuangan daerah

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. *Peluang*

- Memenuhi sumber daya aparatur yang memenuhi syarat untuk menerapkan sistim pengelolaan keuangan daerah.
- Tersedianya jaringan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.



- Adanya Komitmen Bupati terhadap pengembangan sistim pengelolaan keuangan daerah

b. *Ancaman*

- Rendahnya pemahaman aparatur terhadap sistim aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- Pemberlakuan sistim komputerisasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional akan menyebabkan sanksi bila tidak ditaati.
- Terbatasnya dana Pemerintah Kabupaten Banggai (APBD)

Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat menguntungkan jika dibandingkan dengan peningkatan kualitas [mutu modal manusia jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang yang pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup minimum.

Terdapat beberapa isu dalm penyelenggaraan tugas dan fungsi peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;

1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 2009 PASAL 24, penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.;

2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antar daerah; .

3) Kurang optimalnya peran dinas sosial profinsi,kabupaten dan kota di dalm menyusun rencana program dan anggaran.;



4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini di cerminkan dengan pola penanganan kesejahteraan sosial di kabupate\kota sangat beragam kelembagaan pemerintah yang menanganinya, sehingga fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan sosial di kabupaten\kota relative sangat kecil. Kondisi ini melahirkan kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah populasi penyandang masalah kesejahteraan sosisl yang di tangani. Perbedaan nomenkaltur struktur organisasi yang menangani permasalahan sosial didaerah kabupaten\kota ,dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan sosial di daerah.

5) Masih lemahnya penangana korban bencana alam dan bencana sosial merupakan gangguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa [manusia], harta benda dan lingkungannya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya memerlukan bantuan dari luar [masyarakat,pemerintah,organisasi kemanusiaan], atas dasar tersebut maka pemerintah [pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung jawab yang besar dalam menangani masyarakat yang tertimpa bencana.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD

Rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2019. Berdasarkan usulan yang disampaikan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, seluruh usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rencana awal RKPD. Untuk tahun 2019, pagu indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai sebesar RP. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah) terdiri atas 11 [sebelas] program dan 76 [tujuh puluh enam] kegiatan sumber dana APBD.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan menuju perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



Untuk mendukung sembilan agenda prioritas nasional tersebut khususnya agenda point 2 dan 3, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai yaitu:

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran stratejik BPKAD Kabupaten Banggai merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap – tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran stratejik BPKAD Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja secara lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Banggai. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.



Kemudian pada masing – masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program – program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program BPKAD Kabupaten Banggai untuk mencapai visi sesuai misi masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG LEBIH PROFESIONAL DAN AKUNTABEL”				
Tujuan	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kebijakan	
<i>Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</i>	<i>Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan</i>	<i>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
			<i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	
		<i>Persentase Penyerapan Keuangan Daerah yang Sesuai Target</i>	<i>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
		<i>Opini BPK Terhadap LKPD</i>	<i>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
		<i>Persentase Data Aset Yang Akurat</i>	<i>Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
	<i>Meningkatnya Tata Kelola BPKAD yang baik, bersih dan Akuntabel</i>		<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja</i>	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>
				<i>Peningkatan Disiplin Aparatur</i>
				<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>
				<i>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</i>

**3.3. Program dan Kegiatan****Target dan Realisasi Tahun 2019**

No	Uraian Program/Keg.	Target (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
	BELANJA			
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	18.152.831.847,34	12.721034.015	70,07
	Belanja Pegawai	18.152.831.847,34	12.721.034.015	70,07
	Belanja Gaji dan Tunjangan	11.563.684.520	6.805.528.618	58,85
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.123.238.300	2.812.530.364	90,05
	Tunjangan Keluarga	230.207.688	230.022.524	99,91
	Tunjangan Jabatan	216.565.750	214.270.000	98,93
	Tunjangan Fungsional	29.193.000	28.860.000	98,85
	Tunjangan Fungsional Umum	102.780.250	101.685.000	98,93
	Tunjangan Beras	144.220.809	143.464.020	99,47
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.853.232	1.607.264	86,72
	Pembulatan Gaji	45.425	45.155	99,40
	Jaminan Kecelakaan Kerja	1.390.374.298	818.931.914	58,90
	Jaminan Kematian	4.171.122.895	2.375.816.314	56,95
	Jaminan Kesehatan	2.154.082.873	78.296.063	36,34
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.589.147.327,34	5.915.505.397	89,77
	Tambahan Penghasilan	6.589.147.327,34	5.915.505.397	89,77
2	BELANJA LANGSUNG	6.887.441.698,75	6.603.865.690	95,88
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.597.196.878	2.433.705.045	93,71
01.01	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.192.000	11.568.000	95,00
01.02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	231.500.000	180.962.169	78,17
01.08	Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	66.509.900	66.213.623	99,55
01.10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	82.368.500	82.368.450	100
01.11	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.200.000	54.450.000	98,64
01.12	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.429.000	30.393.068	99,88
01.15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.472.932	99,64
01.17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	39.520.000	27.038.371	68,42
01.18	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan	1.030.885.000	1.026.989.010	99,62



		Konsultasi ke Luar Daerah			
	01.19	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	142.792.478	142.422.430	99,74
	01.20	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	898.300.000	803.826.992	89,48
	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	347.643.568	308.224.566	88,66
	02.07	Keg. Perlengkapan Gedung Kantor	31.930.000	29.938.819	93,76
	02.09	Keg. Peralatan Gedung Kantor	199.386.750	181.820.880	91,2
	02.24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	82.000.000	74.168.148	90,45
	02.26	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.326.818	15.305.455	99,86
	02.28	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	14.000.000	6.991.264	49,94
	02.32	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	5.000.000	-	-
	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	94.480.000	76.426.734	80,89
	05.01	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	63.000.000	45.000.000	71,43
	05.04	Keg. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	31.480.000	31.426.734	99,83
	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73.916.775	70.521.236	95,41
	06.01	Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.400.000	4.399.150	99,98
	06.02	Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	9.000.000	8.989.400	99,88
	06.04	Keg. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.937.200	8.917.100	99,78
	06.05	Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan	34.555.000	31.998.446	92,60



		Anggaran SKPD			
	06.07	Keg. Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	3.750.000	3.742.450	99,80
	06.09	Keg. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	13.274.575	12.474.690	93,97
	07.	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	2.600.000	2.566.000	98,69
	07.04	Keg. Penyediaan data dan Updating Data dan Informasi Perangkat Daerah	2.600.000	2.566.000	98,69
	15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.977.148.262,75	2.922.383.726	98,16
	15.01	Keg. Penyusunan Analisa Standar Belanja	37.303.475	37.283.336	99,95
	15.02	Keg. Penyusunan Standar Harga Satuan	70.241.750	70.241.750	100
	15.04	Keg. Penyusunan Sitem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	20.791.900	20.706.472	99,59
	15.06	Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	406.710.906,75	406.330.860	99,91
	15.08	Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	170.913.168	167.549.370	98,03
	15.14	Keg. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	7.250.000	7.093.860	97,85
	15.16	Keg. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	343.193.500	342.355.188	99,76
	15.20	Keg. Penatausahaan Barang Daerah	127.085.750	127.071.280	99,99
	15.21	Keg. Penyusunan Standar Pelayanan Publik	4.499.875	3.226.950	71,71
	15.22	Keg. Penatausahaan Keuangan PD	5.000.000	4.979.400	99,59
	15.23	Keg. Penatausahaan Keuangan SKPKD	15.502.000	15.462.140	99,74
	15.24	Keg. Fasilitasi dan Penyediaan data BPKAD dan Realisasi Bantuan Keuangan	8.000.000	7.884.924	98,56
	15.25	Keg. Fasilitasi dan Penausahaan TPTGR	59.599.700	59.242.220	99,40



15.26	Keg. Pengembangan dan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	99.071.000	90.311.200	91,16
15.27	Keg. Penyelenggaraan Progrsm Kerja Tim Pertimbangan Dana Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial	178.185.738	178.113.968	99,96
15.28	Keg. Penelitian RKA/RKPA dan DPA/DPPA PD	54.900.000	54.579.262	99,42
15.29	Keg. Pengelolaan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan	24.899.725	24.710.499	99,24
15.30	Keg. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran Anggaran Mendahului Penetapan APBD	31.376.575	31.294.146	99,74
15.32	Keg. Asistensi, Verifikasi dan Pengentrian Data Anggaran PD dalam Rangka Penelitian SPD	16.000.000	15.999.300	100
15.33	Keg. Penelitian/ Verifikasi Kelengkapan SPM PD dalam rangka Penertiban SP2D	80.000.000	79.835.000	99,79
15.34	Keg. Monitoring dan Pembinaan tugas Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	102.000.000	100.577.604	98,61
15.35	Keg. Penyusunan Laporan Arus Kas	17.499.900	17.469.900	99,83
15.36	Keg. Penausahaan Administrasi Kas Umum Daerah	60.828.975	60.262.630	99,07
15.37	Keg. Bimtek Penausahaan Keuangan PD	17.550.000	17.550.000	100
15.38	Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah	35.399.700	28.518.885	80,56
15.39	Keg. Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan Penerimaan Kas Daerah serta Peyerapan Anggaran dengan Unit Kerja dan Instansi Terkait	209.868.125	204.981.323	97,67
15.40	Keg. Fasilitasi dan Penatausahaan DPA/DPPA PD	15.000.000	14.995.000	99,97
15.41	Keg. Verifikasi dan Finalisasi Daftar Gaji	83.500.000	83.382.367	99,86



		PNS			
	15.42	Keg. Sosialisasi Pengajian PNS	20.200.000	18.950.000	93,81
	15.43	Keg. Peningkatan dan Pengembangan SDM Penyusun Laporan Keuangan	46.450.000	42.946.195	92,49
	15.44	Keg. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	237.796.549	227.684.297	95,75
	15.45	Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Per Triwulan	12.799.700	8.439.090	65,93
	15.47	Keg. Rekonsiliasi Realisasi APBD	127.377.551	123.939.200	97,30
	15.48	Keg. Pembinaan dan Pengendalian SPJ OPD	64.253.000	63.413.185	98,69
	15.49	Keg. Pembinaan Kebijakan dan Sistem Akuntansi PD	150.599.700	149.516.034	99,28
	15.70	Keg. Pembinaan dan Pengendalian Anggaran OPD	15.500.000	15.486.891	99,92
	17.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.945.275	2.926.000	99,35
	17.03	Keg. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	2.945.275	2.926.000	99,35
	18.	Program Pengelolaan Barang Daerah	791.510.940	787.112.383	99,44
	18.01	Keg. Pensertifikatan Tanah Aset Pemerintah Daerah	328.015.900	324.655.633	98,98
	18.02	Keg. Penyelenggaraan Administrasi Barang Daerah	45.422.900	45.422.900	100
	18.03	Keg. Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi dan Pengelolaan Aset Daerah	156.965.050	156.349.700	99,61
	18.04	Keg. Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	192.591.190	192.584.490	100
	18.05	Keg. Pembinaan Penyimpan/Pengurus Barang Daerah	26.613.600	26.613.600	100
	18.07	Keg. Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah	20.226.600	20.226.600	100
	18.08	Keg. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan dan Pengelolaan Aset Daerah	10.375.350	10.375.350	100



	18.09	Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	11.300.350	10.884.110	96,32
			6.887.441.698	6.603.865.690	95,88

Berdasarkan realisasi tahun 2019 diatas dan target tahun 2020 untuk melaksanakan semua program dan kegiatan tersebut di atas dibutuhkan dana secara indikatif sebesar Rp.11.041.635.000,- Sedangkan dari tugas selaku penyalur dana bantuan dan dana bagi hasil yang termasuk dalam fungsi PPKD disesuaikan dengan ketersediaan dana daerah dan kebijakan pemerintah daerah.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai catatan penting dalam pelaksanaan Renja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Apabila anggaran terbatas, maka kegiatan yang bersifat rutin seperti *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*, *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, *Program Peningkatan Disiplin Aparatur*, *Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur*, dan *Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* menjadi prioritas dengan tetap mengupayakan efisiensi (penghematan); sementara itu program yang menjadi program pokok dalam menjalankan tugas tugas pokok dan fungsi SKPD harus tetap terlaksana dengan memberikan pendanaan pada pos-pos penting melalui perhitungan yang cermat.
- b. Penganggaran belanja yang mempunyai dampak luas seperti Gaji, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan jaminan kesehatan ASKES pada BTL menjadi prioritas dengan perhitungan yang cermat.
- c. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaporan, maka dipandang perlu pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan secara penuh melalui pelatihan sumber daya manusia oleh lembaga yang kompeten dibidang aplikasi tersebut.



Dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 ke depan, diperlukan sinkronisasi dan kesinambungan program dan kegiatan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan, untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sehingga lebih terukur dampaknya bagi kemajuan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan kelanjutan penjabaran dari Visi, Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra 2016-2021). Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh bidang, subbidang dan termasuk para Pegawai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dalam menjalankan tugas kepemimpinan Badan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 dengan mengerahkan semua potensi (sumber daya) yang ada;
3. Bidang-bidang dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang nantinya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas serta menjamin konsistensinya;



Sebagai tindak lanjut dari Renja Tahun 2019 sebagai berikut:

Dana indikatif adalah besaran dana yang diusulkan oleh satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan kegiatan tahun rencana (tahun 2020) dan perkiraan maju tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.11.041.635.000,- untuk tahun 2020 dengan rincian dana berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel Lampiran, dan tahun 2021 sebesar Rp.13.025.160.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Banggai.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Banggai terpilih periode 2016-2021 yaitu “ Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya” melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2020. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan asset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual dan penerapan teknologi informasi yakni diterapkannya sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset berupa SIMDA yang terintegrasi secara online.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.



Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan kelanjutan penjabaran dari Visi, Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra 2016-2021). Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

4. Seluruh bidang, subbidang dan termasuk para Pegawai berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai dalam menjalankan tugas kepemimpinan Badan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 dengan mengerahkan semua potensi (sumber daya) yang ada;
6. Bidang-bidang dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang nantinya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas serta menjamin konsistensinya;



Demikian Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kabupaten Banggai kami sampaikan, yang merupakan rencana kerja satu tahun kedepan (2018) mengacu sepenuhnya pada Rencana Stratejik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2018 ini diharapkan dapat dipahami oleh seluruh jajaran pada lingkup BPKAD Kabupaten Banggai. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pejabat dan staf BPKAD memiliki kesamaan persepsi kearah mana tujuan organisasi. Dengan demikian diharapkan agar semua jajaran berusaha mencapai tujuan bersama dengan segenap program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Banggai yang telah direncanakan.

Rencana Kerja ini disusun setiap tahun dan pada akhir tahun dilakukan evaluasi pencapaian kinerja yang dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Semoga Rencana Kerja ini dapat terealisasi secara kongkrit agar dapat dirasakan manfaatnya bagi proses pelaksanaan pembangunan dimasa datang.

Luwuk, 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI**



MARSIDIN RIBANGKA, SE.,M.SI
NIP. 19660909 199603 1 002

